

UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM EKSPOR PRODUK KERAJINAN UKM (STUDI KASUS KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, KALIMANTAN SELATAN)

Khaerani Abbas¹

Abstract: *This research aims to describe the efforts of the local government and the central government to export handicraft products from Hulu Sungai Utara in 2017-2020. The research method used in compiling this thesis is descriptive type. The data technique uses literature review by collecting information through direct interviews and relying on a variety of literature related to the research topic, and the types of data used are primary data and secondary data. The analysis technique used is qualitative. In this study, researchers used the theory of comparative advantage.*

The results of this study indicate that the Indonesian government in advancing the HSU handicraft industry focuses on training programs, providing facilities and infrastructure, as well as conducting promotional activities both domestically and abroad where previously since 2017 HSU has had requests for handicrafts from Japan in the form of mats, however could not be fulfilled because of the alignments of the craftsmen's capabilities, thus becoming an obstacle in export activities. There fore the government has taken an active role by making efforts from 2017- 2020 where the results of the government program were able to increase the ability of craftsmen as evidenced by the increasing number of craftsmen and there is demand for handicrafts from abroad such as the Netherlands, China, Germany and Europe.

Keywords: *Handicraft Industry, Export, HSU, Government Efforts*

Pendahuluan

Dalam sistem ekonomi global terdapat aktivitas perdagangan bebas yang dicirikan dengan hilangnya berbagai hambatan dalam perdagangan antar negara baik berupa hambatan yang bersifat tarif seperti kegiatan ekspor impor dan juga yang bersifat non-tarif (Atih Rohaeti, 2005). Adanya fenomena dalam perdagangan bebas ini memberikan keuntungan kepada negara-negara yang terlibat dimana negara dapat menopang keberlangsungan perekonomiannya dan berdampak positif terhadap pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP) pada periode 2001-2014 (Nazaruddin Malik, 2017). Salah satu negara yang ikut andil dalam perdagangan bebas yakni Indonesia, para pelaku bisnis di Indonesia turut aktif dalam menjalin kerjasama dengan negara lain dalam melakukan kegiatan ekspor dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu sektor yang memanfaatkan adanya perdagangan bebas yakni UKM dimana UKM memainkan peran penting dalam perekonomian dalam negeri (Mohamad Dian, 2017), UKM tersebar luas diberbagai daerah di Indonesia dan usaha tersebut mayoritas terbentuk dari masyarakat setempat.

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, E-mail: sayakhaerani@gmail.com

Salah satu daerah yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kalimantan Selatan yang memiliki industri prioritas yakni industri kerajinan dimana pemerintah berperan aktif dalam mengembangkan UKM di daerah tersebut, HSU terdiri dari 10 Kecamatan dan 219 desa (BPS HSU, 2019). Pada tahun 2010-2014 HSU merupakan daerah yang pernah dapat predikat tertinggal karena minimnya SDA namun pada tahun 2019 telah terlepas dari predikat tertinggal, HSU memiliki 2 sektor industri yakni industri formal dan non-formal dimana industri kerajinan menjadi industri yang mayoritas dengan jumlah unit usaha mencapai 19.752 unit usaha pada tahun 2016, jumlah industri kerajinan begitu tinggi akibat aktifitas kerajinan sudah menjadi tradisi masyarakat dan merupakan mata pencaharian bagi masyarakat HSU dimana terdapat sentra-sentra kerajinan yang sudah tersebar diberbagai kecamatan, sentra kerajinan terbentuk dari lingkungan masyarakat dengan melakukan kerjasama dalam produksi kerajinan, faktor wilayah menjadi salah satu faktor yang menjadikan jumlah industri kerajinan sangat banyak dimana 80% merupakan hamparan rawa (hulusungaiutarakab.go.id 2018). Berdasarkan keputusan Bupati No 218 tahun 2012 tentang penetapan produk unggulan Kabupaten HSU dimana produk unggulan merupakan produk kerajinan, UKM kerajinan memanfaatkan bahan baku seperti purun, eceng gondok, rotan merah dan banban sebagai bahan baku utama dalam membuat produk kerajinan seperti topi, tas, tikar dan sandal dimana mampu menarik perhatian baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Sejak tahun 1990 HSU telah mengembangkan industri kerajinan dan menjadi industri unggulan selain itu HSU memiliki peluang dalam kegiatan ekspor dimana terdapat 2 faktor yakni. Pertama, HSU telah mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dimana terdapat banyak permintaan dari dalam negeri dikarenakan harga yang relatif murah serta bahan baku yang berbeda-beda, pada tahun 2016 HSU memiliki permintaan dari Bali, Jakarta, Lombok, Jogjakarta dan Jepara. Kedua, selain permintaan dari dalam negeri juga terdapat permintaan dari luar negeri seperti Korea Selatan yang memiliki permintaan produk kerajinan HSU berupa tikar pada tahun 2016 sebanyak 10.000 lembar namun tidak dapat dipenuhi secara utuh akibat tidak dapat diimbangi dengan kontrol kualitas produk yang baik, kemudian Jepang menjadi negara pertama pemesan kerajinan di HSU dengan diawali pesanan berupa tikar lampit sebanyak 3.000 lembar tikar, dalam pengiriman ke Jepang melalui seleksi terlebih dahulu dengan memperhatikan standarisasi produk, negara selanjutnya yang tertarik dengan produk kerajinan HSU adalah Jerman dimana pada tahun 2015 terdapat pesanan kerajinan yang terbuat dari bahan baku eceng gondok yang diolah menjadi produk tas dan tikar. Selain itu dalam perkembangan kerajinan di HSU terdapat pemasaran dalam daerah yang terkenal yakni pasar kerajinan dimana pasar ini juga menjadi tempat wisata bagi pengunjung dari luar kota, di pasar kerajinan menjadi tempat pemasaran strategis kerajinan yang dihasilkan oleh masyarakat Hulu Sungai Utara.

Dalam perkembangannya industri kerajinan HSU juga mengalami berbagai hambatan dalam kegiatan ekspor ke luar negeri, berikut beberapa hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat. Pertama, keterampilan masyarakat HSU dalam memproduksi kerajinan masih rendah disebabkan oleh masyarakat yang

bekerja bukan hanya di bidang kerajinan namun juga di bidang pertanian dimana ketika musim pertanian tiba maka proses produksi kerajinan akan terputus sehingga pengrajin belum dapat konsisten dalam memproduksi sedangkan permintaan kerajinan cukup banyak.

Pengrajin yang terlibat dalam produksi kerajinan juga mengandalkan kemampuan secara manual dalam menganyam sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam produksi dengan jumlah yang banyak. Pada produk kerajinan HSU terdapat 2 standarisasi yakni standar A untuk produk yang layak dijual keluar daerah dan tidak cacat sedangkan standar B hanya dapat dijual ke dalam daerah karena hasil produksi yang belum memenuhi standar biasanya standar B ini diproduksi oleh pengrajin lanjut usia.

Kedua, terdapat faktor persaingan dalam negeri dengan industri kerajinan yang ada di Jawa dan Bali dimana memiliki sistem distribusi yang baik dengan dibentuknya saluran distribusi dengan perusahaan dalam menyalurkan produk kerajinan ke luar negeri, hal ini berbanding terbalik dengan HSU dimana dalam distribusi kerajinan masih mengalami berbagai hambatan sebab letak HSU yang berada di pelosok Kalimantan Selatan sehingga mempengaruhi biaya pengiriman produk kerajinan. Selain itu dalam hal pemanfaatan teknologi dalam pemasaran dan produksi dimana HSU masih terbatas dalam menggunakan teknologi dalam percepatan produksi. Ketiga, terbatasnya kemampuan masyarakat dalam memahami kegiatan ekspor dimana masyarakat masih belum memahami prosedur dalam ekspor salah satunya adalah penggunaan SKA atau surat keterangan asal yang sangat penting dalam penetapan asal barang dan menetapkan tarif bea masuk. (bsn.go.id 2009)

Dalam perkembangan industri kerajinan HSU pada kegiatan ekspor dimana HSU memiliki peluang yang dilihat dari adanya negara-negara yang tertarik dengan kerajinan HSU serta HSU menjadi salah satu Kabupaten pemasok kebutuhan kerajinan dalam negeri yang berbahan baku purun dan eceng gondok, namun dalam menembus pasar internasional HSU masih mengalami berbagai hambatan sehingga penulis akan membahas mengenai upaya pemerintah dalam ekspor kerajinan HSU.

Kerangka Teori

Comparative Advantage Theory

Teori keunggulan komparatif yang diungkapkan oleh David Ricardo merupakan keunggulan dan keuntungan suatu negara dimana memiliki produksi yang berbeda dengan negara lain dimana dalam produksi menggunakan biaya rendah namun secara kualitas memiliki keunggulan sendiri, suatu negara dikatakan mampu melakukan

kegiatan ekspor jika negara tersebut melakukan spesialisasi pada kegiatan produksinya ([John Murray, 1821](#)) Berikut asumsi David Ricardo mengenai keunggulan komparatif melalui *Labor theory of Value* yaitu nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam memproduksi barang

dimana barang yang diekspor harus seimbang dengan jumlah tenaga kerja yang dipergunakan untuk memproduksi barang. David Ricardo mengungkapkan bahwa tenaga kerja akan mampu melakukan produksi barang secara efisien jika diimbangi dengan adanya mobilisasi secara sempurna, dalam melakukan produksi barang tentunya dengan diberikan sejumlah peralatan, perlengkapan dan infrastruktur untuk menunjang kualitas pekerja oleh karena itu jumlah tenaga kerja yang sama selalu dibutuhkan dalam memenuhi standar spesialisasi dalam memproduksi barang.

Berdasarkan asumsi di atas, dapat dipahami bahwa negara akan memperoleh keuntungan dalam perdagangan internasional jika masing-masing negara melakukan spesialisasi terhadap produknya yang akan diekspor. Menurut T. May Rudy, dalam aktifitas ekspor pada perdagangan bebas yang dikatakan sebagai aktifitas dalam mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri tentu perlu memperhatikan standar ketentuan yang berlaku (T. May Rudy 2002). Sehingga para pelakunya pun akan saling menguntungkan jika mampu berpatokan pada penghematan biaya produksi untuk meningkatkan perolehan keuntungan sehingga produksi barang dapat dijalankan dengan biaya yang relatif rendah dengan memakai harga barang dan upah pekerja sebagai patokan (Bob Sugeng, 2002)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif bertujuan memberi gambaran upaya pemerintah daerah dan pusat dalam ekspor kerajinan HSU. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik telaah pustaka, yakni berupa kajian kritis atas pembahasan suatu topik, data diambil dari hasil wawancara dengan narasumber serta buku, situs internet, dan jurnal terpercaya yang kemudian diolah ke dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis dan informasi dari wawancara langsung. Penulis berupaya untuk menganalisis data-data yang dikumpulkan sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat sementara.

Hasil dan Pembahasan

Industri kerajinan HSU sudah menjadi mata pencaharian bagi masyarakat HSU untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga industri kerajinan menjadi prioritas pemerintah untuk dikembangkan agar menjadi salah satu industri yang dapat menembus pasar bebas dan dapat bersaing sehingga untuk mencapai kegiatan ekspor tersebut pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mendorong kemajuan industri kerajinan HSU.

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pada RPJPD Daerah HSU tahun 2005-2025 dimana kebijakan pembangunan pemerintah mengarah kepada pembangunan ekonomi untuk menciptakan kemajuan ekonomi masyarakat daerah dengan memanfaatkan sektor-sektor yang berpotensi dimana industri kerajinan menjadi sektor prioritas pemerintah (Peraturan Pemerintah HSU, 2011). Pemerintah HSU memiliki komitmen untuk mendorong kemajuan industri kerajinan agar dapat berkembang dan bersaing sehingga pemerintah melakukan berbagai upaya yang cukup kuat dalam mengembangkan kerajinan HSU agar memiliki mutu dan kualitas yang baik, berikut dibawah ini beberapa upaya yang dilakukan pemerintah daerah:

1. Program Pelatihan Kerajinan

Program pelatihan merupakan suatu kegiatan yang telah tersusun dan terencana secara baik bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian untuk menghasilkan kualitas dan mutu yang baik (Yohanes Arianto, 2017). Pelatihan kerajinan merupakan salah satu agenda wajib yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah HSU melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM sejak tahun 2010 pelatihan kerajinan di HSU masih terbilang minim dilaksanakan sehingga pada tahun 2018 pemerintah HSU menetapkan program pelatihan industri kerajinan dilaksanakan sebanyak 19 kali dimana pemerintah bersinergi dengan sentra- sentra kerajinan HSU yang tersebar disetiap kecamatan. Beberapa program kerajinan yang dilaksanakan oleh pemerintah yakni pelatihan keterampilan tenaga kerja dan pelatihan manajemen ekspor.

a. Pelatihan keterampilan tenaga kerja

pelatihan yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan para pengrajin, mayoritas masyarakat HSU bekerja sebagai pengrajin akibat kurangnya SDA untuk dimanfaatkan, pada tahun 2020 jumlah pengrajin di HSU mencapai angka 28.064 pengrajin namun tingkat kemampuan pengrajin masih terbilang rendah oleh karena itu pemerintah melakukan pelatihan kerajinan dengan sasaran pengrajin disetiap kecamatan. Dalam satu tahun pelatihan terdiri dari pelatihan anyaman purun, eceng gondok, banban dan rotan serta pelatihan kemasan yang dilakukan secara rutin, banyaknya permintaan dari dalam negeri dan luar negeri sehingga fokus pelatihan yakni pengrajin dilatih untuk dapat memproduksi kerajinan dengan memperhatikan standar kualitas yang telah ditentukan. Pelatihan kerajinan juga melalui arahan dari Disperindagkop pelatihan dan pembinaan juga meilbakan instruktur

ahli dari Jogjakarta guna melatih para pengrajin dalam memproduksi kerajinan dengan kualitas yang baik, perbaikan kualitas melalui pelatihan sangat membantu pengrajin untuk menjaga kualitas oleh karena itu spesialisasi produk menjadi prioritas pemerintah. Pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah mendorong kemajuan industri kerajinan HSU agar mampu menciptakan produk yang memiliki daya saing dan membantu para pengrajin untuk meningkatkan pendapatan.

b. Pelatihan Manajemen Ekspor

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perdagangan internasional yakni persyaratan ekspor yang harus dipenuhi sebelum melakukan kegiatan ekspor, di HSU banyak masyarakat yang belum mengetahui prosedur dalam ekspor sehingga pemerintah juga melakukan upaya dengan mengadakan pelatihan ekspor untuk menembus pasar bebas. Pemerintah daerah HSU melakukan pelatihan dan sosialisasi mengenai ekspor melihat banyaknya permintaan dari luar negeri, adanya ketertarikan terhadap produk-produk berbahan alami dan ramah lingkungan sehingga industri HSU harus memanfaatkan peluang dan mengikuti standar ekspor. Pelatihan ekspor yang dilakukan oleh pemerintah dapat membuka wawasan masyarakat akan besarnya peluang kerajinan diminati banyak negara dan agar masyarakat dapat terlibat langsung dalam kegiatan ekspor, pemerintah juga memberikan arahan mengenai standarisasi produk sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa setiap negara memiliki standarisasinya masing-masing.

c. Penyediaan Sarana dan Prasarana bagi UKM Kerajinan

Dalam mempercepat proses produksi pemerintah melakukan upaya yakni penyediaan sarana dan prasarana bagi UKM Kerajinan di HSU dimana pemerintah setiap tahunnya sejak tahun 2016 memberikan bantuan sebesar 500 juta untuk penyediaan mesin peralatan seperti mesin tumbuk, mesin jahit, dan mesin bordir, peralatan tersebut merupakan kebutuhan sentra kerajinan dalam proses produksi. Selain itu pemerintah daerah juga membantu pengembangan UKM kerajinan dengan membangun Rumah Kreatif BUMN (RKB) untuk melakukan pelatihan seperti pemasaran online dan pengembangan usaha, RKB merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan dimana terdapat 147 UKM yang terlibat dalam pelatihan di RKB dan mendapatkan fasilitas berupa zona display, zona pelatihan, zona registrasi, dan zona konsultasi.

d. Mengadakan Kegiatan Promosi

Dalam melakukan promosi kerajinan HSU pemerintah juga melakukan upaya dengan melakukan kegiatan promosi diberbagai kegiatan baik tingkat nasional maupun internasional, berikut beberapa upaya promosi kerajinan yang dilakukan pemerintah daerah antara lain Pertama, promosi yang dilakukan pemerintah melalui Dekranasda dimulai dari promosi dalam daerah dengan mendirikan galeri kerajinan daerah dimana galeri menjadi tujuan utama wisatawan untuk melihat koleksi kerajinan khas HSU. Kedua, mulai tahun 2018-2020 HSU mengikuti pameran di Jakarta melalui pameran Kriya Nusa dimana HSU membawa produk berkualitas ekspor untuk mempromosikan kerajinan kepada pengunjung pameran tersebut. Ketiga, HSU juga turut hadir dalam pameran Expo Nusantara TMII 2019 kegiatan ini dihadiri oleh 157 peserta yang terdiri dari 34 provinsi, kegiatan ini menjadi ajang untuk memperlihatkan mutu dan kualitas kerajinan HSU dan yang keempat melalui Badan Restorasi Gambut (hsu.go.id 2019).

HSU juga turut mengikuti pameran kerajinan internasional di Norwegia pada tahun 2019 dimana ini merupakan pameran kebudayaan, perdagangan dan pariwisata dengan tujuan untuk memperkenalkan atau promosi produk lokal dari ekosistem gambut kepada dunia yang digelar oleh Kedutaan Besar RI di Oslo. Anyaman purun dari HSU mendapat kesempatan untuk dipromosikan pada acara tersebut guna memperkenalkan produk-produk dari olahan purun kepada pengunjung festival tersebut, harapan dari kegiatan tersebut adalah produk dari dapat diminati oleh masyarakat luar negeri. Selain promosi diatas pemerintah HSU juga melakukan upaya promosi ke luar negeri bekerjasama dengan PT Pos Indonesia melalui program e-Comercial dimana seluruh kerajinan dari HSU dipromosikan melalui situs PT Pos Indonesia untuk menjangkau banyak peminat akan kerajinan khas daerah Hulu Sungai Utara.

Upaya Pemerintah Pusat Melalui Badan Restorasi Gambut Indonesia

Badan Restorasi Gambut dibentuk pada tahun 2016 oleh Presiden Republik Indonesia sebagai lembaga yang harus bertanggung jawab dalam menyelamatkan daerah yang memiliki wilayah gambut agar dapat berkembang baik dari segi wilayah maupun perekonomian masyarakatnya. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 pasal 3 disebutkan bahwa BRG mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut dan pembinaan ekonomi masyarakat pada Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Papua ([Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016](#)).

HSU merupakan salah satu daerah di Kalimantan Selatan yang memiliki wilayah 89% daerah gambut menjadi perhatian pemerintah pusat untuk dilakukan

pengembangan dan pembinaan, Kalimantan selatan menjadi prioritas pemerintah untuk dikembangkan termasuk dalam sektor perekonomiannya, pada tahun 2017 di Kabupaten HSU terdapat beberapa desa seperti Desa Pulantani, Desa Haur Gading, Desa Murung Panggang, Desa Tambak Sari Panji, Desa Sungai Namang dan Desa Tuhuran terletak di Kabupaten HSU sudah tergabung dalam desa peduli gambut yang merupakan objek pendampingan oleh Badan Restorasi Gambut (BRG) (brg.go.id 2017).

Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat yakni Pertama, melakukan kegiatan pelatihan serta pendampingan dimana kegiatan ini dilakukan berdasarkan surat keputusan Bupati mengenai desa peduli gambut agar selalu terjalin sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk membangun perekonomian di daerah HSU melalui peranan BRG dimana kehadiran BRG di Hulu Sungai Utara mendorong adanya penguatan ekonomi masyarakat, menurut ketua Dekranasda HSU ibu Hj, Anisah Rasyidah bahwa penguatan ekonomi yang telah dilakukan oleh BRG dengan melakukan upaya seperti meningkatkan ekonomi kelompok usaha pengrajin melalui pembinaan, pelatihan dan penyediaan sarana prasarana seperti alat mesin jahit dan alat pengolahan produk kerajinan, melalui program BRG juga telah dibentuk fasilitator desa yang dimana bertugas untuk melakukan pendampingan terhadap unit usaha kerajinan dalam rangka meningkatkan produktivitas unit usaha kerajinan dimana salah satunya dilaksanakan di desa Pulantani Kecamatan Haur Gading.

Pemerintah pusat memilih HSU sebagai tempat lokatitih pengembangan kerajinan anyaman purun dan eceng gondok sehingga melalui BRG terdapat pelatihan di beberapa desa yang sangat bermanfaat dalam meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengelolah bahan baku purun dan eceng gondok dengan tujuan agar produk yang dihasilkan dapat mempunyai nilai yang lebih tinggi agar dapat bersaing dalam negeri dan mampu menembus pasar bebas dan menarik minat masyarakat luar negeri. Selain itu pemerintah pusat juga melalui BRG melakukan kerjasama dengan Du'Anyam sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang kerajinan dan telah memiliki kantor cabang di Jepang. Melalui kerjasama dengan BRG dan Du'Anyam, industri kerajinan di HSU mendapatkan apresiasi dari Presiden Joko Widodo dimana dengan adanya berbagai macam pelatihan dan pendampingan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memajukan industri kerajinan sehingga masyarakat tidak lagi memproduksi kerajinan dengan kualitas yang kurang bagus dan lebih menekankan ke berbagai desain dan inovasi yang baru.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mendorong kemajuan Industri melalui program pelatihan sebagai bentuk implementasi dari *Comparative Advantage* yang dikemukakan oleh David Ricardo dengan berfokus pada indikator keberhasian melalui *labor theory of value* dimana yang dibutuhkan adalah jumlah tenaga kerja yang selalu sama untuk memenuhi standar spesialisasi dalam produksi. Berdasarkan data dari dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM Kab. Hulu Sungai Utara hingga tahun 2020 jumlah pengrajin bertambah menjadi 28.084 pengrajin. Selain peningkatan pengrajin juga terdapat peningkatan pemesanan baik dari dalam negeri maupun luar negeri akibat adanya inovasi yang dilakukan oleh

pengrajin purun.

Upaya pemerintah terbilang efektif dimana adanya peningkatan pengrajin juga terdapat kenaikan permintaan dari luar negeri seperti produk-produk sedotan purun yang merupakan sebuah inovasi baru setelah diadakannya pelatihan dimana pada tahun 2020 pengrajin mampu memproduksi sedotan purun untuk memenuhi permintaan dari Belanda sebanyak 200 ribu batang perbulan sebab adanya keinginan dari negara Belanda untuk menggunakan produk yang berbahan alami. Sedotan purun adalah sedotan yang memiliki keunggulan dapat di daur ulang dan mudah terurai.

Pada tahun 2019 pengusaha dari Tiongkok datang langsung ke Amuntai, Hulu Sungai Utara untuk melihat pembuatan kerajinan dari eceng gondok dan purun setelah kunjungan tersebut terdapat permintaan kerajinan berupa tas dan tikar sebanyak 150 ribu buah dan permintaan tersebut langsung dikoordinir oleh pimpinan KUB Kembang Ilung untuk mengarahkan sebanyak 120 pengrajin yang tersebar di beberapa desa untuk memproduksi permintaan tersebut kemudian permintaan tersebut terus berlanjut guna memenuhi permintaan dari Tiongkok yakni setiap bulannya para pengrajin diharuskan untuk menghasilkan 10.000 produk kerajinan.

Dari berbagai upaya oleh pemerintah telah menghasilkan beberapa peningkatan di sektor kerajinan dan membuka banyak potensi baik potensi internal dan potensi eksternal, adapun potensi internal antara lain adalah HSU dapat menjadi daerah penghasil kerajinan terbesar di Kalimantan Selatan, kemudian setelah pelatihan dapat dilihat potensi kemajuan pada kemampuan masyarakat yang bekerja sebagai pengrajin untuk melakukan produksi barang yang lebih variatif serta menjadikan HSU sebagai kota wisata kerajinan yang didukung oleh adanya pasar kerajinan dan susur rawa. Selain potensi internal juga terdapat potensi eksternal yakni produk kerajinan HSU dapat lebih banyak menarik minat pembeli dari luar negeri dan membuka peluang pemasaran produk kerajinan HSU di pasar luar negeri serta mendapatkan banyak permintaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian secara langsung dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki potensi daerah yakni wilayah yang didominasi oleh rawa, sehingga hal ini mendorong masyarakat untuk memanfaatkan bahan baku seperti eceng gondok dan purun untuk diolah menjadi sebuah produk kerajinan yang memberikan keuntungan kepada masyarakat HSU. Produk kerajinan HSU yang diproduksi oleh masyarakat telah dijual ke luar daerah seperti Bali, Jakarta, Lombok dan Jogjakarta, produk HSU memiliki ciri khas pada produknya oleh karena itu minat akan kerajinan HSU bukan hanya dari dalam negeri namun juga dari luar negeri seperti Jerman, Tiongkok dan Belanda yang telah memesan produk kerajinan HSU seperti tikar, tas dan sedotan purun sehingga kerajinan HSU dapat menembus pasar internasional.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah hingga tahun 2020 menghasilkan peningkatan yang signifikan seperti bertambahnya jumlah pengrajin di HSU hingga mencapai angka 28.064 pengrajin, produk yang dihasilkan telah menyesuaikan dengan permintaan yang ada dan terdapat spesialisasi produk serta pemberian merek, kemudian terdapat permintaan produk dari beberapa negara seperti Belanda, Tiongkok dan Eropa dengan jumlah mencapai puluhan ribu produk. Oleh karena itu dengan adanya upaya pemerintah tersebut industri kerajinan HSU mengalami perkembangan yang sangat baik dan memiliki kesiapan dalam memproduksi produk secara penuh.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2017, *Statistik Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 2017*, CV. Karya Bintang Musim: Amuntai
- Dian Revindo, Mohamad, 2017, *Internationalisation of Indonesian SMEs*, Disertasi, Lincoln University
- Malik, Nazaruddin *Ekonomi Internasional*, 2017, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang
- May Rudy, T, 2002, *Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Bandung
- Pameran Kriya Nusa tersedia di [https://www.kemenperin.go.id/artikel/19724/Menperin:-Industri-Kerajinan- Berpotensi-Sumbang-Ekspor-Besar](https://www.kemenperin.go.id/artikel/19724/Menperin:-Industri-Kerajinan-Berpotensi-Sumbang-Ekspor-Besar)
- Pameran TMII tersedia di <https://www.hsu.go.id/web/dekranasda-hsu-akan-berpartisipasi-dalam-hut-ke-44-tmii/>
- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2018, *Dana Desa Percepat HSU Keluar Status Tertinggal*, tersedia di <https://www.hulusungaiutarakab.go.id/dana-desa-percepat-hsu-keluar-status-tertinggal/>
- Pembinaan oleh BRG tersedia di <https://brg.go.id/profilesapeduligambut/>
- Peraturan Daerah Kab. HSU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Badan Restorasi Gambut
- Ricardo, David, 1821, *On The Principles of Political Economy and Taxation (Third Edition)*, John Murray, Albemarle-Street, London

Rohaeti Dariah, Atih “Perdagangan Bebas: Idealisme dan Realitas”, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 21, No. 1, 2005, hal. 115-126

Standarisasi Kerajinan diakses pada
https://bsn.go.id/main/berita/berita_det/837/Standardisasi-kerajinan-disiapkan--Produk-tidak-hanya-bernilai-seni--tetapi-juga-komersial diakses pada tanggal 06 maret 2021

Sugeng Hadiwinata, Bob, 2002, *Politik Bisnis Internasional*, Kanisius, Yogyakarta.